

## Bupati Banjar dan Walikota Banjarbaru Terima Pertanggungjawaban Direksi PDAM Intan Banjar



teras7.com

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Intan Banjar menggelar Rapat Umum Penyertaan Modal (RUPM) Tahun Buku 2019 di Kantor PDAM Intan Banjar, Banjarbaru pada Selasa (28/1).

RUPM Tahun Buku 2019 ini dihadiri oleh Bupati Banjar, H. Khalilurrahman dan Walikota Banjarbaru, Nadjmi Adhani sebagai Kepala Daerah yang menyertakan modalnya dalam PDAM Intan Banjar.

Bupati Banjar yang akrab disapa Guru Khalil mengatakan RUPM ini membahas pertanggungjawaban Direksi PDAM Intan Banjar pada tahun 2019.

Demikian pula dengan Walikota Banjarbaru, Nadjmi Adhani yang menambahkan hasil laporan dari hasil audit lembaga auditor independen menyatakan PDAM meraih WTP 5 kali berturut-turut.

“Kami sebagai penyerta modal sepakat menerima laporan kinerja yang disampaikan. Kami juga sepakati penyampaian progres pencapaian selama 2019 dan program PDAM Intan Banjar tahun 2020,” terangnya.

Pemko Banjarbaru siap memberikan *backup* dan dukungan pada rencana kerja PDAM Intan Banjar. “Intinya kami puas dengan kinerja Direksi. Pada tahun 2020-2021 ini kami juga akan kembali melakukan penyertaan modal sebesar 35 miliar rupiah dan penyertaan aset berupa lahan untuk pembangunan *booster* air di dekat Bandara Syamsudin Noor,” jelas Nadjmi Adhani.

Pihaknya juga tengah mempertimbangkan terkait penambahan penyertaan aset milik Pemko.

"Kita sedang mempertimbangkan menambah penyertaan aset untuk lokasi booster pompa air. Lokasinya di sekitaran kawasan bandara. Secara lokasi sudah dinyatakan laik, nanti tinggal teknisnya," pungkasnya.

### **Sumber Berita:**

**teras7.com**, *Bupati Banjar dan Walikota Banjarbaru Terima Pertanggungjawaban Direksi PDAM Intan Banjar*, Selasa, 28 Januari 2020.

**banjarmasin.tribunnews.com**, *Walikota Banjarbaru H. Nadjmi Adhani Hadiri Rapat Umum Penyerta Modal PDAM Intan Banjar*, Selasa, 28 Januari 2020.

### **Catatan:**

#### **Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)**

BUMD merupakan aset milik Pemerintah Daerah yang memiliki fungsi sebagai perpanjangan tangan peran pemerintah dalam pelayanan publik. Peranan BUMD dalam sistim perekonomian daerah diharapkan dapat berperan disamping sebagai penyeimbang kekuatan pasar juga diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui penyeteroran deviden sebagai bagian laba BUMD.

Pengaturan mengenai BUMD sebagai perusahaan milik daerah sebelumnya diatur dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (UU 5/1962). Pasal 2 UU 5/1962 menyatakan Perusahaan Daerah ialah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang.

Berdasarkan ketentuan tersebut, seluruh perusahaan milik Pemerintah Daerah disebut Perusahaan Daerah. Namun dengan diundangkannya UU 23/2014 yang “mencabut” ketentuan UU 5/1962, terjadi perubahan peristilahan Perusahaan Daerah menjadi BUMD, karena Pasal 1 angka 40 UU 23/2014 mendefinisikan BUMD sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Pengaturan terkini yang terkait langsung dengan pengaturan BUMD adalah UU 23/2014 dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

#### **Penyertaan Modal Pemerintah Daerah**

Pasal 1 angka 4 PP Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, menyatakan Penyertaan Modal adalah bentuk Investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseoran Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Pemerintah Daerah sebagai pemilik perusahaan dapat memberikan bantuan finansial, salah satunya melalui penyertaan modal. Penyertaan modal berperan penting pada tahap

awal pembentukan perusahaan karena dana dapat digunakan untuk pembangunan dasar yang menunjang operasional bisnis perusahaan, misalnya untuk pembangunan infrastruktur yang terkait dengan operasional perusahaan.

Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah upaya meningkatkan produktifitas pemanfaatan tanah dan/atau bangunan serta kekayaan lainnya milik Pemerintah Daerah dengan membentuk usaha bersama dan saling menguntungkan. Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan: a. sumber Pendapatan Asli Daerah; b. pertumbuhan ekonomi; c. pendapatan masyarakat; dan d. penyerapan tenaga kerja. (Sumber: Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Gresik Migas, 2012, hal. 4)

Penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan kepada Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta dengan cara penambahan, pengurangan, penjualan kepada pihak lain, dan pengalihan kepada BUMD sesuai peraturan perundang-undangan. Investasi Pemerintah Daerah cenderung diberikan kepada BUMD yang memiliki misi sebagai agent of development. Negara terlibat dalam perekonomian masyarakat dengan mengelola sumber daya untuk kemakmuran rakyat yang bertanggungjawab sebagai penyedia pelayanan publik dan biasanya dibebankan kepada perusahaan publik.

Berdasarkan hal tersebut, BUMD memiliki peran multifungsi, yaitu sebagai perintis pelayanan publik, membuka lapangan kerja, dan mencari laba untuk mengisi kas daerah. BUMD harus dikelola sesuai prinsip swasta, namun dengan memperhatikan pula kepentingan masyarakat. Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan. (Sumber: Fitri Erna Muslikah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Depok Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Depok, Depok: Universitas Indonesia, 2015, hal.72.)